

## PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENANGANI ANAK PUTUS SEKOLAH DI DESA BABAKAN KARET

Rachmat Rachmat<sup>1</sup>, Neli Yuliawati<sup>2</sup>, Yasinta Nursawali<sup>3</sup>

<sup>\*123</sup>Ilmu Pemerintahan, STISIP Guna Nusantara Cianjur

\*Corresponding author: [rachmatstisipgunanusantara@gmail.com](mailto:rachmatstisipgunanusantara@gmail.com)

### ABSTRAK

#### Informasi Artikel:

Terima:

Revisi:

Disetujui:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam menangani permasalahan anak putus sekolah di Desa Babakankaret, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan informan yang terdiri dari aparat desa, tenaga pendidik, orang tua, serta anak putus sekolah. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji menggunakan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan perannya sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator melalui program pendidikan nonformal, pemberian bantuan pendidikan, serta sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat. Namun, efektivitas peran tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan ekonomi masyarakat, rendahnya kesadaran pendidikan, keterbatasan sarana prasarana, serta faktor sosial budaya. Program akselerasi pendidikan yang diterapkan memberikan dampak positif, namun belum sepenuhnya menjangkau seluruh anak usia wajib belajar yang putus sekolah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran pemerintah desa dalam menangani anak putus sekolah belum optimal dan memerlukan penguatan kebijakan, peningkatan koordinasi, serta partisipasi masyarakat yang lebih luas agar upaya yang dilakukan lebih efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Pemerintah Desa, Anak Putus Sekolah, Pendidikan, Kebijakan Pendidikan*

### ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the village government in addressing the issue of school dropouts in Babakankaret Village, Cianjur District, Cianjur Regency. A qualitative approach with a case study design was employed. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, involving key informants such as village officials, teachers, parents, and school dropouts. Data analysis was conducted using data reduction, data display, and conclusion drawing, while validity was ensured through triangulation techniques. The findings reveal that the village government has performed its roles as a facilitator, regulator, and catalyst through the implementation of non-formal education programs, provision of educational assistance, and community awareness initiatives regarding the

*importance of education. However, these efforts have not yet been fully effective due to several constraints, including economic limitations, low educational awareness, inadequate infrastructure, and socio-cultural factors. The implementation of educational acceleration programs has shown positive impacts, yet it has not comprehensively reached all school-age children who have dropped out. This study concludes that the role of the village government in addressing school dropout issues remains suboptimal and requires stronger policy support, improved coordination, and greater community participation to ensure more effective and sustainable outcomes.*

**Keywords:** *Village Government, School Dropouts, Education Policy, Rural Education.*

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas serta menjadi indikator utama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat (Laverde-Rojas et al., 2019). Dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menciptakan generasi yang mampu bersaing di era global (Sari et al., 2022). Oleh karena itu, akses terhadap pendidikan yang merata dan berkualitas merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin oleh pemerintah.

Meskipun berbagai kebijakan dan program telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan, permasalahan anak putus sekolah masih menjadi tantangan serius, khususnya di wilayah pedesaan (Dufitumukiza et al., 2020). Fenomena ini tidak hanya berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, tetapi juga berpotensi memperkuat lingkaran kemiskinan dan ketimpangan sosial. Anak yang putus sekolah cenderung memiliki keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga berdampak pada masa depan individu maupun pembangunan daerah secara keseluruhan (Rupinus et al., 2023; Supriatna, 2023).

Permasalahan anak putus sekolah dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, serta faktor sosial budaya di lingkungan masyarakat (Ridwan et al., 2020; Sofyan & Agustang, 2022). Selain itu, kurangnya dukungan dari orang tua dan akses pendidikan yang terbatas juga menjadi penyebab utama tingginya angka putus sekolah (Ridwan et al., 2020). Dalam konteks ini, pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai institusi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Pemerintah desa diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan secara langsung, merumuskan kebijakan yang tepat, serta mengimplementasikan program-program yang efektif dalam menangani anak putus sekolah. Peran tersebut meliputi fungsi sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap Pendidikan (W. Wahyudi & Mahdiansyah, 2023; Wiryanto, 2022).

Desa Babakankaret, Kabupaten Cianjur merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi permasalahan anak putus sekolah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah

desa, seperti pelaksanaan program pendidikan nonformal, pemberian bantuan pendidikan, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan. Namun demikian, efektivitas upaya tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, dan faktor sosial ekonomi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam peran pemerintah desa dalam menangani anak putus sekolah, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta mengevaluasi strategi yang telah diterapkan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pendidikan di tingkat desa serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang pemerintahan dan pendidikan.

## **LANDASAN TEORI**

### **Peran Pemerintah**

Peran pemerintah merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status yang dimiliki oleh suatu lembaga dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya di masyarakat (Y. T. Wahyudi et al., 2022) (Setiadi et al., 2025). Menurut Soerjono Soekanto dalam Publicuho et al. (2024) menyatakan bahwa peran mencakup seperangkat norma, perilaku, dan harapan yang melekat pada suatu posisi sosial. Dalam konteks pemerintahan, peran pemerintah desa menjadi sangat penting karena merupakan institusi yang paling dekat dengan masyarakat dan memahami secara langsung kebutuhan serta permasalahan yang dihadapi oleh warga.

Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asas otonomi desa. Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah desa berperan sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator (Jaelani & Fidaris, 2024). Sebagai fasilitator, pemerintah desa menyediakan sarana dan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan akses pendidikan. Sebagai regulator, pemerintah desa menetapkan kebijakan atau aturan yang mendukung penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan sebagai katalisator, pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat serta mempercepat proses perubahan sosial menuju kondisi yang lebih baik.

Selain itu, menurut Sondang P. Siagian, pemerintah juga memiliki fungsi sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana (Pujianti & Katon, 2023). Fungsi-fungsi ini menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berperan sebagai pengatur, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam pembangunan masyarakat. Dalam kaitannya dengan penanganan anak putus sekolah, peran pemerintah desa sangat menentukan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan pendidikan serta mengatasi berbagai hambatan yang ada di masyarakat.

---

### **Konsep Anak Putus Sekolah**

Anak putus sekolah merupakan kondisi di mana seorang anak tidak melanjutkan atau berhenti dari proses pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan yang seharusnya ditempuh. Fenomena ini menjadi salah satu permasalahan sosial yang berdampak luas, baik bagi individu maupun masyarakat (Diana, 2021). Secara umum, anak yang putus sekolah kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri secara optimal, sehingga berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan (Jusmelinda, 2022).

Menurut Pratama et al. (2026), penyebab anak putus sekolah dapat diklasifikasikan menjadi dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Pratama et al., 2026). Faktor internal meliputi rendahnya motivasi belajar, kondisi kesehatan, serta keterbatasan kemampuan individu. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kondisi ekonomi keluarga, lingkungan sosial, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, serta keterbatasan sarana dan prasarana Pendidikan.

Selain itu, faktor budaya juga berpengaruh, seperti anggapan bahwa pendidikan tidak terlalu penting bagi masa depan anak. Lingkungan yang kurang mendukung pendidikan dapat memperbesar kemungkinan anak untuk berhenti sekolah (Behr et al., 2020). Oleh karena itu, permasalahan anak putus sekolah tidak dapat dipandang secara sederhana, melainkan sebagai fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai aspek.

Penanganan anak putus sekolah memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Upaya yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penyediaan akses pendidikan, tetapi juga pada peningkatan kesadaran masyarakat serta pemberdayaan ekonomi keluarga (Putri et al., 2021). Dengan demikian, diharapkan angka putus sekolah dapat ditekan dan kualitas pendidikan masyarakat dapat meningkat.

### **Program Akselerasi/Kebijakan Pendidikan**

Program akselerasi dalam pendidikan merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, akses, dan pemerataan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Secara umum, program akselerasi diartikan sebagai upaya percepatan proses pendidikan melalui penyediaan layanan yang lebih fleksibel, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Program ini tidak hanya ditujukan bagi siswa berkemampuan tinggi, tetapi juga sebagai solusi alternatif bagi anak-anak yang mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan formal, termasuk anak putus sekolah (Tuhuteru et al., 2023).

Dalam perspektif kebijakan publik, kebijakan pendidikan merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan pendidikan serta mencapai tujuan pembangunan nasional (Anggraini, 2018). Kebijakan ini mencakup

perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program-program pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut adalah program wajib belajar serta pendidikan nonformal seperti paket A, B, dan C (Anggraini, 2018; Bashori & Aprima, 2019).

Program akselerasi juga berkaitan dengan upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya pada dimensi pendidikan. Pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan melalui penyediaan sarana prasarana, pemberian bantuan pendidikan, serta pengembangan lembaga pendidikan nonformal (Harimurti, 2023). Selain itu, kebijakan pendidikan yang efektif harus mampu menjangkau kelompok masyarakat rentan dan mengatasi kesenjangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Dalam implementasinya, keberhasilan program akselerasi sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar lembaga, ketersediaan sumber daya, serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan di tingkat lokal menjadi faktor penting dalam memastikan program berjalan efektif dan berkelanjutan, khususnya dalam menangani permasalahan anak putus sekolah (Pratiwi, 2021).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji secara mendalam peran pemerintah desa dalam menangani anak putus sekolah di Desa Babakankaret, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara holistik serta memahami perspektif dan pengalaman para informan secara mendalam (Radianto, 2023).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive sampling, meliputi aparat pemerintah desa, orang tua, anak putus sekolah, tenaga pendidik, serta tokoh masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan, serta literatur yang relevan dengan penelitian (Gunadi et al., 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu (Fufa et al., 2023). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Babakankaret selama kurang lebih empat bulan. Melalui metode ini, diharapkan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran, hambatan, serta strategi pemerintah desa dalam menangani permasalahan anak putus sekolah.



---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Babakankaret memiliki peran yang cukup signifikan dalam menangani permasalahan anak putus sekolah. Peran tersebut dapat dianalisis melalui tiga fungsi utama, yaitu sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Jaelani dan Fidaris (2024).

**Sebagai fasilitator**, pemerintah desa telah berupaya menyediakan berbagai dukungan pendidikan, seperti pemberian bantuan biaya pendidikan, penyelenggaraan program pendidikan nonformal, serta menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Program ini memberikan alternatif bagi anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan formal untuk tetap memperoleh pendidikan setara. **Sebagai regulator**, pemerintah desa berperan dalam merumuskan kebijakan dan mendorong implementasi program wajib belajar. Hal ini dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, serta upaya mengarahkan anak usia sekolah agar tetap melanjutkan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, fungsi regulasi ini belum berjalan optimal karena masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Selanjutnya, **sebagai katalisator**, pemerintah desa berupaya mendorong partisipasi masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dan pendekatan sosial kepada orang tua. Peran ini terlihat dalam upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat agar lebih peduli terhadap pendidikan anak.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas peran pemerintah desa. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama anak putus sekolah, di mana sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, pedagang, dan buruh dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah. Hal ini mengonfirmasi temuan dari Pratama et al. (2026) bahwa kondisi ekonomi keluarga merupakan faktor eksternal dominan penyebab anak putus sekolah. Kondisi ini membuat keluarga kesulitan membiayai pendidikan anak. Selain itu, faktor sosial budaya juga berpengaruh, seperti rendahnya pandangan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Masih terdapat anggapan bahwa pendidikan tinggi tidak menjamin perubahan nasib, sehingga anak cenderung didorong untuk bekerja daripada melanjutkan sekolah. Temuan ini selaras dengan pandangan Behr et al. (2020) yang menyatakan bahwa lingkungan yang kurang mendukung dan persepsi negatif terhadap pentingnya pendidikan dapat memperbesar peluang anak untuk berhenti sekolah. Faktor lain yang turut berpengaruh adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk jarak tempuh sekolah yang cukup jauh dan akses transportasi yang terbatas, hal ini sesuai dengan tantangan pendidikan di pedesaan yang diangkat oleh Dufitumukiza et al. (2020) dan Ridwan et al. (2020).

Dari sisi kebijakan, program akselerasi pendidikan yang diterapkan pemerintah desa melalui kerja sama dengan PKBM telah memberikan dampak positif, terutama bagi anak yang telah melewati usia wajib belajar. Namun, program ini belum sepenuhnya mampu menjangkau

anak usia wajib belajar yang putus sekolah, sehingga masih diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan inklusif.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori peran pemerintah yang menyatakan bahwa pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. Namun, efektivitas peran tersebut sangat bergantung pada dukungan sumber daya, koordinasi antar lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa dalam menangani anak putus sekolah di Desa Babakankaret sudah berjalan, namun belum optimal. Diperlukan peningkatan koordinasi, penguatan kebijakan, serta pemberdayaan masyarakat agar upaya yang dilakukan dapat lebih efektif dan berkelanjutan dalam menekan angka putus sekolah. Temuan bahwa peran pemerintah desa di Desa Babakankaret belum optimal mengukuhkan teori Wahyudi et al. (2022) yang menyatakan bahwa peran pemerintah adalah aspek dinamis yang sangat bergantung pada pelaksanaan tanggung jawabnya di masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Pratiwi (2021), keberhasilan program pemerintah di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar lembaga, ketersediaan sumber daya, serta partisipasi aktif masyarakat

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Babakankaret telah menjalankan perannya dalam menangani anak putus sekolah melalui fungsi sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Upaya yang dilakukan meliputi penyediaan program pendidikan nonformal, pemberian bantuan pendidikan, serta sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat. Selain itu, kerja sama dengan lembaga pendidikan seperti PKBM menjadi salah satu strategi yang cukup efektif dalam memberikan akses pendidikan alternatif bagi anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan formal.

Namun demikian, efektivitas peran tersebut belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan, antara lain faktor ekonomi keluarga yang rendah, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, serta faktor sosial budaya yang masih memandang pendidikan sebagai hal yang kurang prioritas. Di sisi lain, implementasi program akselerasi pendidikan belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran, khususnya anak usia wajib belajar yang putus sekolah.

Dengan demikian, peran pemerintah desa dalam menangani anak putus sekolah masih memerlukan penguatan, baik dari aspek kebijakan, pelaksanaan program, maupun keterlibatan masyarakat agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan

## REFERENSI

Anggraini, W. W. (2018). Efektivitas Program Pendidikan Luar Sekolah Dalam Kejar Paket C Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Variant Centre" Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. *Aplikasi Administrasi Media Analisa Masalah Administrasi*, 20(1),



39. <https://doi.org/10.30649/aamama.v20i1.91>
- Bashori, B., & Aprima, S. G. (2019). Analisis Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Provinsi Lampung. *Produ Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.15548/p-prokurasi.v1i1.3324>
- Behr, A., Giese, M., Kamdjou, H. D. T., & Theune, K. (2020). Dropping Out of University: A Literature Review. *Review of Education*, 8(2), 614–652. <https://doi.org/10.1002/rev3.3202>
- Diana, R. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Siswa Putus Sekolah Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 14(2). <https://doi.org/10.24832/jpkp.v14i2.497>
- Dufitumukiza, A., Ntakirutimana, E., Niyibizi, E., & Mukanziza, J. (2020). The Nine Year Basic Education Policy and Secondary School Internal Efficiency. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)*, 9(6), 202–212. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i6.907>
- Fufa, F. S., Tulu, A. H., & Ensene, K. A. (2023). Examining the Challenges of Using Student-Centred Teaching Strategies in Secondary Schools: A Qualitative Approach. *Journal of Pedagogical Sociology and Psychology*. <https://doi.org/10.33902/jpsp.202323181>
- Gunadi, B., Kostini, N., & Alexandri, M. B. (2023). Evaluasi Kebijakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Cimahi Tahun 2020. *Responsive*, 5(4), 321. <https://doi.org/10.24198/responsive.v5i4.34750>
- Harimurti, R. S. D. (2023). Analisis Pengaruh Dana Desa, IPM, Dan Jumlah Masyarakat Miskin Pedesaan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Jie*, 7(03), 405–418. <https://doi.org/10.22219/jie.v7i03.27055>
- Jaelani, M. A., & Fidaris, N. (2024). Evaluasi Peran Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Melalui Pemberdayaan UMKM Di Kota Mataram. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 14(2), 151–162. <https://doi.org/10.33592/jiia.v14i2.4953>
- Jusmelinda, S. (2022). *Mereformasi Tata Kelola Sumber Daya Aparatur Sipil Negara*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/jh7yu>
- Laverde-Rojas, H., Correa, J. C., Jaffé, K., & Caicedo, M. I. (2019). Are Average Years of Education Losing Predictive Power for Economic Growth? An Alternative Measure Through Structural Equations Modeling. *Plos One*, 14(3), e0213651. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0213651>
- Pratama, F. I., Ulfa, M., & Harjanti, D. T. (2026). *Faktor Penyebab Angka Putus Sekolah Di Desa Merarai Satu Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Factors Contributing to School Dropout Rates in Merarai Satu Village , Sungai Tebelian Subdistrict , Sintang Regency*. 19, 236–241.
- Pratiwi, P. (2021). Decentralization and Governance in Indonesia. *Jurnal Wacana Kinerja Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 24(2), 117. <https://doi.org/10.31845/jwk.v24i2.729>
- Publicuho, J., Riyadh, A., Publik, S. A., Sidoarjo, U. M., & Timur, J. (2024). *Peran badan permusyawaratan desa dalam perencanaan pembangunan desa medalem 1*. 7(4), 2351–2367.
- Pujianti, P., & Katon, M. G. (2023). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kelurahan Pandeyan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta. *Journal of Social Politics and Governance (Jspg)*, 5(2), 171–



185. <https://doi.org/10.24076/jspg.v5i2.1457>
- Putri, B. G. R., Irfan, M., & Santoso, M. B. (2021). Upaya Peningkatan Kesadaran Pentingnya Melanjutkan Pendidikan Terhadap Anak Dan Remaja Putus Sekolah Di RT 04/Rw 05 Kelurahan Kebon Kangkung Kota Bandung. *Focus Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 149. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.31796>
- Radianto, E. (2023). Interpretasi Modern Tentang Teori Dan Filosofis Penelitian. *Kritis*, 32(1), 56–74. <https://doi.org/10.24246/kritis.v32i1p56-74>
- Ridwan, R., Irawaty, I., & Momo, A. H. (2020). FAKTOR PENYEBAB ANAK PUTUS SEKOLAH (Studi Di Desa Mapila Kecamatan Kabaena Utara Kabupaten Bombana). *Selami Ips*, 12(1), 62. <https://doi.org/10.36709/selami.v12i1.10838>
- Rupinus, R., Arifin, A., & Akadira, T. (2023). Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang. *Vox Edukasi Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 14(2), 301–310. <https://doi.org/10.31932/ve.v14i2.2852>
- Sari, A. I. C., A'ini, Z. F., & Tukiran, M. (2022). Pengaruh Anggaran Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Jabe (Journal of Applied Business and Economic)*, 9(2), 127. <https://doi.org/10.30998/jabe.v9i2.15082>
- Setiadi, S., Maulana, R., & Hidayat, S. (2025). Dampak Pungutan Desa terhadap Aset dan Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Ilmu Manajemen Retail Universitas Muhammadiyah Sukabumi*, 6(2), 160–180. <https://doi.org/10.37150/jimat.v6i2.3732>
- Sofyan, & Agustang, A. (2022). *Dinamika Putus Sekolah Di Kalangan Pekerja Anak Di Kota Makassar*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ucbz4>
- Supriatna, E. (2023). Inisiatif Partisipasi Sosial Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah: Studi Kasus Pada Jaringan Kerja Dan Kolaborasi Antara Lembaga Pemerintah, LSM, Dan Masyarakat Sipil Di Indonesia. *Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(3), 1828. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i3.2196>
- Tuhuteru, L., Misnawati, D., Aslan, A., Taufiqoh, Z., & Imelda, I. (2023). The Effectiveness of Multimedia-Based Learning to Accelerate Learning After the Pandemic at the Basic Education Level. *Tafkir Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 4(1), 128–141. <https://doi.org/10.31538/tijie.v4i1.311>
- Wahyudi, W., & Mahdiansyah, M. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Mendukung Pendidikan Anak-Anak Desa Terpencil. *Jurnal Borneo Humaniora*, 6(2), 87–95. [https://doi.org/10.35334/borneo\\_humaniora.v6i2.4926](https://doi.org/10.35334/borneo_humaniora.v6i2.4926)
- Wahyudi, Y. T., Iriany, I. S., & Ramadhanti, D. C. (2022). Peran Camat Dalam Pengawasan Pegawai Dalam Rangka Menciptakan Good Governance Di Kecamatan Garut Kota. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 13(2), 40–56. <https://doi.org/10.36624/jpkp.v13i2.127>
- Wiryanto, W. (2022). Model Inovasi Pendidikan Dasar Dan Menengah Untuk Penguatan Peran Masyarakat Masa Pandemi Covid-19. *Equity in Education Journal*, 4(1), 42–52. <https://doi.org/10.37304/eej.v4i1.4216>